

PERAN INDONESIA DALAM KEANGGOTAAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)

Sita Hidriyah

Abstrak

Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor kemaritiman internasional. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Keanggotaan Indonesia dalam IMO harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempromosikan isu-isu atau program yang menjadi kepentingan nasional, dan hal tersebut dapat dilakukan jika Indonesia mengambil peran dalam IMO. Menjadi kepentingan bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan perairannya yang luas, untuk terlibat secara langsung melalui IMO dalam memelihara terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran internasional, khususnya di kawasan. Keselamatan dan keamanan pelayaran tersebut tidak saja berkaitan dengan upaya menciptakan jalur pelayaran internasional yang terbebas dari ancaman tindak kejahatan transnasional, tetapi juga yang terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan. Peran Indonesia dalam keanggotaan IMO harus menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional secara berkelanjutan. Bagaimana peran Indonesia dalam keanggotaan IMO menjadi fokus kajian singkat ini.

Pendahuluan

Aktivitas Indonesia di Organisasi Kemaritiman Internasional (*International Maritime Organization/IMO*) menjadi berita belakangan ini, setelah dalam sidang IMO ke-31 di London (Inggris), pada 29 November 2019, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2020-

2021. Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 139 serta menduduki peringkat ke-5 dari 20 negara anggota Dewan IMO lainnya (Kompas, 2 Desember 2019). Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO yang beranggotakan 40 negara dengan tiga kategori dari total 174 negara anggota IMO menunjukkan pengakuan dunia



atas eksistensi Indonesia di sektor kemaritiman internasional. Pada sidang IMO ke-31 tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga terpilih sebagai *external audit* IMO mengalahkan Inggris dan Italia.

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya, menyebutkan bahwa menjadi anggota Dewan IMO Kategori C memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Dewan IMO kategori C merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis (republika.co.id., 30 November 2019). Keanggotaan Indonesia dalam IMO harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempromosikan isu-isu atau program yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, dan hal tersebut dapat dilakukan jika Indonesia mengambil peran dalam IMO. Oleh karenanya, melalui tulisan singkat ini, hendak dibahas bagaimana peran Indonesia dalam keanggotaan di organisasi kemaritiman internasional tersebut.

Sekilas tentang IMO

IMO merupakan sebuah badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri sejak tahun 1959. Organisasi ini bertanggung jawab dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk upaya pencegahan polusi di laut. Keanggotaan Dewan IMO sendiri terdiri dari 40 negara dengan 3 kategori dari total 174 negara

anggota IMO. IMO dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang saat ini dijabat oleh Kitack Lim dari Korea Selatan. Sedangkan Dewan IMO adalah badan pelaksana di bawah Majelis yang bertugas mengelola kegiatan organisasi di antara sidang Majelis. Selain itu, Dewan IMO juga bertugas membuat kebijakan, membahas laporan serta mengambil keputusan-keputusan yang nantinya ditetapkan dalam sidang Majelis IMO. Sidang Paripurna (*Assembly*) IMO berlangsung sekali dalam dua tahun dengan mengadopsi rencana strategis organisasi untuk periode enam tahun.

Jika melihat sejarahnya, IMO didirikan dalam kerangka meningkatkan keselamatan pelayaran di laut, karena aktivitas pelayaran internasional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada konferensi PBB tahun 1948 di Jenewa, Swiss, telah disetujui pembentukan suatu badan internasional khusus untuk menangani masalah-masalah kemaritiman termasuk meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran atas usulan beberapa negara. Pada awalnya, badan yang dibentuk bernama *Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO). Organisasi ini baru diakui secara internasional di tahun 1958 yang kemudian berubah nama menjadi IMO sejak 22 Mei 1982.

IMO merupakan satu-satunya badan PBB yang bermarkas di Inggris. Misi IMO, sebagai badan khusus PBB, adalah untuk mempromosikan pelayaran laut yang aman,

berwawasan lingkungan, efisien dan berkelanjutan melalui kerja sama. Hal ini akan dicapai dengan mengadopsi standar tertinggi keselamatan dan keamanan laut, mengimplementasikan efisiensi navigasi, dan melakukan pencegahan serta pengendalian polusi dari kapal, dan juga dengan memperhatikan berbagai instrumen IMO yang diakui secara universal. Sejalan dengan perkembangan dunia pelayaran, IMO juga memiliki tugas melakukan pembaharuan legislasi yang sudah ada atau mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru. Hal tersebut dilakukan melalui pertemuan yang dihadiri oleh ahli maritim dari negara anggota serta organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah seperti *Greenpeace*, *World Wildlife Fund for Nature (WWF)*, dan lainnya (kemlu.go.id., 24 November 2019).

Peran Indonesia

Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai anggota Dewan IMO, karena memiliki posisi tawar yang tinggi sekaligus strategis dalam menentukan arah dan kebijakan serta penyusunan aturan maritim internasional, yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional. Peran tersebut dilakukan Indonesia dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C, yang merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam transportasi laut atau navigasi maritim, serta mewakili semua wilayah geografis utama dunia. Itu artinya, Indonesia memiliki ruang dan kesempatan untuk menentukan

kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh bagi dunia kemaritiman.

Peran yang dapat dimainkan Indonesia, setidaknya sejalan dengan isu yang diangkat Indonesia dalam sidang IMO tahun ini, adalah mencakup tiga hal. **Pertama**, berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup, terutama menyangkut upaya penanganan sampah plastik. Laporan Bank Dunia (*World Bank*) tahun 2016 menyebutkan, total sampah plastik rata-rata global telah mencapai 242 juta ton, atau menyumbang 12% dari komponen penyebab pencemaran lingkungan. Jika tidak ada aksi nyata dalam menyelamatkan lingkungan, Bank Dunia memproyeksi pencemaran lingkungan akan meningkat hingga 70% pada 2050 (cnbcindonesia.com., 23 November 2018). Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan dengan wilayah perairannya yang luas, sudah tentu tidak boleh mengabaikan persoalan sampah plastik ini.

Kedua, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan pendidikan kejuruan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari semakin berkembangnya teknologi kemaritiman dan tantangan yang dihadapi dunia pelayaran, sehingga kebutuhan untuk menghadirkan sumber daya manusia yang terampil dan andal di bidang kemaritiman menjadi penting untuk diperhatikan. **Ketiga**, berkaitan dengan peran dan keterlibatan perempuan dalam dunia kemaritiman. Meskipun masih memiliki kekurangan, Indonesia diharapkan dapat

meningkatkan keterlibatan dan peran perempuan dalam aktivitas sektor maritim. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan memberi kesempatan lebih besar kepada kaum perempuan untuk bekerja di sektor maritim sekaligus berpartisipasi pada kegiatan kemaritiman di skala nasional maupun internasional.

Selain ketiga isu di atas, Indonesia juga dapat berperan dengan mendorong pentingnya pembenahan sektor pelabuhan, antara lain dengan ikut membenahi kemampuan pelabuhan, terutama di beberapa pelabuhan dalam negeri sehingga dapat melayani perdagangan internasional dan disandari kapal berukuran raksasa. Hal tersebut tentunya akan menguntungkan pelaku industri di Indonesia. Peran yang dilakukan Indonesia tersebut sesungguhnya juga dalam kerangka memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran baik pelayaran nasional maupun internasional.

Peran Indonesia patut diapresiasi sebagai negara kepulauan pertama yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau *Traffic Separation Scheme* (TSS) sesuai keputusan sidang IMO pada Juni 2019. TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan TSS yang dimiliki Indonesia sehingga negara berhak untuk mengaturnya. Dengan dipercayanya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, yang juga merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), menunjukkan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh

karena itu, peran-peran strategis harus dapat dilakukan Indonesia dalam keanggotaannya di IMO.

Sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, yang wilayah perairannya sangat strategis dan menjadi jalur pelayaran internasional, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya, terutama Singapura dan Malaysia, harus dapat memastikan terjaganya keselamatan dan keamanan pelayaran di kawasan ini. Bahkan, dalam lingkup yang lebih luas dan dalam kerangka keamanan navigasi, Indonesia perlu mengambil peran untuk ikut menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di kawasan Asia Pasifik yang juga menjadi area geostrategis Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari globalisasi yang telah menyebabkan semakin eratnya hubungan antarnegara.

Peran Indonesia juga dapat dilakukan dengan terpilihnya BPK RI sebagai auditor eksternal IMO. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam proses pemilihan anggota Dewan IMO, dilaksanakan pula pemilihan auditor eksternal IMO dengan periode kerja tahun 2020 sampai dengan 2023. Hal ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk ikut menata kinerja keuangan IMO. Sebagai auditor eksternal, BPK akan melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja IMO, termasuk terhadap dua institusi pendidikan di bawahnya yaitu *World Maritime University* (WMU) dan *International Maritime Law Institute* (IMLI).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukan hanya pemeriksaan keuangan, namun juga pemeriksaan kinerja. Peran

yang dijalankan oleh Indonesia (melalui BPK RI) terhadap kinerja keuangan IMO ini, sesungguhnya juga bermanfaat bagi Indonesia, karena Indonesia dapat mengambil pelajaran dari tata kelola dan akuntabilitas sektor maritim negara lain. Lebih jauh lagi, sebagai auditor eksternal, BPK dapat menghimpun data-data dari negara anggota IMO. Data-data tersebut, tidak hanya dapat digunakan oleh Indonesia untuk memberikan pendapat terkait pengelolaan keuangan IMO, namun juga menjadi bahan pengetahuan bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor maritim.

Penutup

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO harus benar-benar dimanfaatkan oleh Indonesia untuk berkontribusi dalam mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Menjadi kepentingan bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan perairannya yang luas, untuk terlibat secara langsung melalui IMO dalam memelihara terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran internasional, khususnya di kawasan. Keselamatan dan keamanan pelayaran tersebut tidak saja berkaitan dengan upaya menciptakan jalur pelayaran internasional yang terbebas dari ancaman tindak kejahatan transnasional, tetapi juga yang terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan. Peran Indonesia dalam keanggotaan IMO harus menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran internasional

secara berkelanjutan. Dalam kerangka kepentingan nasional, peran Indonesia tersebut sudah seharusnya juga memberi kontribusi bagi kemajuan perekonomian nasional.

Referensi

- "Brief History of IMO", imo.org, <http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx>, diakses tanggal 9 Desember 2019.
- "Indonesia Bawa 3 Isu di Sidang Dunia IMO", bisnis.com, 30 November 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191130/98/1176188/indonesia-bawa-3-isu-di-sidang-maritim-dunia-imo>, diakses 3 Desember 2019.
- "Indonesia di Dewan Maritim Dunia", *Kompas*, 2 Desember 2019, Hal.6.
- "Indonesia Galang Dukungan agar Terpilih Jadi Anggota Dewan IMO", *kompas.com*, 10 Oktober 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/10/10/221300926/-indonesia-galang-dukungan-agar-terpilih-jadi-anggota-dewan-imo>, diakses tanggal 4 Desember 2019.
- "International Maritime Organization (IMO)", kemlu.go.id, 24 November 2019, https://kemlu.go.id/london/id/pages/international_maritime_organization_imo_/2964/etc-menu, diakses 2 Desember 2019.
- "Jadi Anggota Dewan IMO, Indonesia Perkuat Poros Maritim", *republika.co.id*, 30 November 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/q1rxc4313/jadi-anggota-dewan-imo-indonesia-perkuat-poros-maritim#comment-list>, diakses 4 Desember 2019.
- "Laporan dari Inggris: Indonesia Buka Peluang Kolaborasi Internasional", *bisnis.com*, 2 Desember 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191202/98/1176975/laporan->

dari-inggris-indonesia-buka-peluang-kolaborasi-internasional, diakses 4 Desember 2019.

"Pencapaian Ganda di IMO ke-31, Wujud Eksistensi Indonesia di Dunia Internasional", dephub.go.id, <http://dephub.go.id/post/read/pencapaian-ganda-di-imo-ke-31,-wujud-eksistensi-indonesia-di-dunia-internasional>, diakses 5 Desember 2019.

"Pengelolaan Sampah Plastik, Indonesia Bisa Ikuti Cara Swedia", cncindonesia.com, 23 November 2018, <https://www.cncindonesia.com/news/20181123170529-4-43454/pengelolaan-sampah-plastik-indonesia-bisa-ikuti-cara-swedia>, diakses 5 Desember 2019.

"Return to IMO poses challenges, opportunities for Indonesia", thejakartapost.com, 3 Desember 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/03/return-imo-poses-challenges-opportunities-indonesia.html>, diakses 9 Desember 2019.

"RI Ingin Peran di Tingkat Global", *Kompas* 30 November 2019, Hal.13.



Sita Hidriyah
sita.hidriyah@dpr.go.id

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.